



Silatul Afkar: Jurnal Pemikiran Sosial dan Keagamaan

Vol. 08, No. 1, 2026, p. 1-23

Published by Lakpesdam PWNUTB; p-ISSN [3026-1090](#), e-ISSN [2988-7887](#),

<https://ypppm.or.id/index.php/silatulafkar/en/index>

Determinan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Sosial-Ekonomi: Sebuah Systematic Literature Review

Abdul Haris Rasyidi¹, Amir Hamzah², Ruslan³

¹STIT Palapa Nusantara Lombok NTB, ²Kajian Advokasi Sosial Serta Transfaranansi Anggaran (KASTA) NTB, Indonesia, ³Institut Elkatarie

abdulharisrasyidi30@gmail.com; ah0043608@gmail.com;

ruslanavicina17@gmail.com

Abstract: *Purpose: This study aims to synthesize empirical evidence on the determinants of societal welfare from a socioeconomic perspective in order to build a comprehensive and integrated analytical framework, given that prior literature has tended to examine these determinants separately. Methodology: The study employs a Systematic Literature Review (SLR) approach following the PRISMA 2020 guidelines. Literature searches were conducted across Scopus, Web of Science, ScienceDirect, and Google Scholar for publications from 2015 to 2025, using combinations of the keywords “social welfare,” “socioeconomic determinants,” “income inequality,” “human capital,” “social capital,” and “financial inclusion.” Following identification, screening, and eligibility assessment, a set of indexed, peer-reviewed journal articles was analyzed thematically. Results: The synthesis shows that societal welfare is a multidimensional construct shaped by the interaction of seven principal determinants: education, income, employment opportunity, health, financial inclusion, social capital, and social protection. Education and health function as the foundation of human capital, employment and income serve as direct economic transmission channels, financial inclusion and social capital act as structural enablers that strengthen household economic resilience, while social protection operates as a corrective policy mechanism for vulnerable groups. Conclusion and Implications: Welfare cannot be reduced to income growth alone but requires a holistic, cross-dimensionally integrated policy approach. The policy implications underscore the need for synergy among investment in education, expanded access to health services, strengthened financial inclusion, multidimensional-poverty-based targeting, and the development of social capital as a multisectoral strategy for enhancing societal welfare, particularly in developing-country contexts.*

Keywords: *Societal welfare, socioeconomic determinants, human capital, financial inclusion, social capital, social protection, systematic literature review.*

1. INTRODUCTION

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu indikator fundamental dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu negara, karena merefleksikan kondisi ekonomi, sosial, serta kualitas hidup penduduk secara menyeluruh. Dalam kajian pembangunan modern, konsep kesejahteraan tidak lagi terbatas pada aspek pendapatan semata, tetapi juga mencakup akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan hidup yang layak (Bank, 2019; Waterloo) & Sen, 1999).

Permasalahan ketimpangan sosial-ekonomi masih menjadi isu yang menonjol di berbagai negara, khususnya negara berkembang. Kondisi ini ditandai oleh disparitas pendapatan, pendidikan, dan akses terhadap layanan publik, yang pada akhirnya berdampak pada tingginya angka kemiskinan, pengangguran, serta rendahnya mobilitas sosial (Human Development Report 2021/2022: Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping Our Future in a Transforming World [EN/RU/ZH], 2022; OECD, 2015) Fenomena ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan dinamika makroekonomi global; sebagaimana ditegaskan dalam kajian tentang interaksi kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan, faktor multidimensional kemiskinan dapat saling memengaruhi permasalahan sosial lain seperti pengangguran dan rendahnya capaian pendidikan, sehingga kemiskinan tidak dapat dianalisis hanya melalui ukuran ketimpangan pendapatan, melainkan juga melalui dimensi demografis, kesehatan, dan sosial secara bersamaan.

Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa determinan kesejahteraan bersifat beragam dan multidimensional, namun sebagian besar masih dikaji secara terpisah dan belum disintesis dalam suatu kerangka analisis yang komprehensif. Penelitian mengenai pendidikan, misalnya, cenderung berdiri sendiri dari kajian mengenai inklusi keuangan maupun modal sosial, sehingga interaksi antardeterminan belum banyak dieksplorasi secara sistematis. Padahal, pemahaman atas keterkaitan antarvariabel tersebut sangat penting bagi perumusan kebijakan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk mengintegrasikan temuan empiris secara sistematis, transparan, dan dapat direplikasi (Tranfield et al., 2003).

Studi ini secara spesifik diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian: (1) determinan sosial-ekonomi apa yang paling konsisten teridentifikasi sebagai faktor penentu kesejahteraan masyarakat dalam literatur kontemporer; (2) bagaimana mekanisme keterkaitan antardeterminan tersebut membentuk kesejahteraan secara multidimensional; dan (3) implikasi kebijakan apa yang dapat dirumuskan dari sintesis temuan tersebut, khususnya bagi konteks negara berkembang. Dengan menjawab ketiga pertanyaan ini, penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis berupa kerangka integratif determinan kesejahteraan, serta kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan pembangunan yang lebih holistik.

Urgensi kajian ini juga didorong oleh fakta bahwa berbagai badan internasional, termasuk UNDP melalui Laporan Pembangunan Manusia dan Oxford Poverty and Human Development Initiative melalui Multidimensional Poverty Index (MPI), secara konsisten menunjukkan bahwa kemajuan kesejahteraan global belakangan justru melambat dan disparitas antarwilayah melebar, sementara intervensi kebijakan kesejahteraan di banyak negara masih dirancang secara sektoral, terpisah antara kebijakan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan keuangan inklusif. Kesenjangan antara sifat multidimensional determinan kesejahteraan di satu sisi, dan pendekatan kebijakan yang masih terfragmentasi di sisi lain, menjadi gap penelitian (research gap) utama yang ingin dijawab oleh studi ini melalui sintesis literatur yang terintegrasi.

2. THEORETICAL Framework and Conceptual Model

2.1. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat mencakup berbagai dimensi, baik ekonomi maupun non-ekonomi, seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan, serta kualitas hidup secara keseluruhan. Konsep ini sering dikaitkan dengan Human Development Index (HDI) dan pendekatan quality of life dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (Human Development Report 2021/2022: *Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping Our Future in a Transforming World* [EN/RU/ZH], 2022; Stiglitz et al., 2009) Laporan Pembangunan Manusia 2025 yang dirilis UNDP mencatat bahwa kemajuan pembangunan manusia global pada tahun 2023 mengalami perlambatan tercepat sejak tahun 1990, sementara ketimpangan antara negara berkategori HDI rendah dan

sangat tinggi justru melebar selama empat tahun berturut-turut, sebuah sinyal bahwa pertumbuhan agregat tidak otomatis menghasilkan pemerataan kesejahteraan antar wilayah.

Keterbatasan HDI dalam menangkap kompleksitas kemiskinan multidimensional mendorong pengembangan Multidimensional Poverty Index (MPI) oleh Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) bersama UNDP. Berbeda dengan ukuran kemiskinan berbasis pendapatan yang hanya menetapkan satu garis ambang batas, MPI menetapkan ambang deprivasi pada sepuluh indikator yang terbagi dalam tiga dimensi berbobot setara, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup; seseorang dikategorikan miskin secara multidimensional apabila mengalami deprivasi pada sepertiga atau lebih indikator berbobot tersebut. Laporan MPI Global 2024 mencatat bahwa dari sekitar 1,1 miliar penduduk yang teridentifikasi miskin secara multidimensional di seluruh dunia, hampir separuhnya terkonsentrasi di lima negara, yang menunjukkan bahwa kemiskinan multidimensional tetap terpola secara geografis meskipun indikator pendapatan agregat suatu negara mengalami perbaikan. Pendekatan MPI ini secara konseptual berakar pada gagasan Sen (1999) mengenai pengembangan kapabilitas sebagai tujuan akhir pembangunan, bukan sekadar akumulasi pendapatan atau utilitas, sehingga memperkuat argumen bahwa kesejahteraan perlu diukur secara multidimensional, bukan unidimensional berbasis pendapatan semata.

2.2. Human Capital Theory

Teori modal manusia menjelaskan bahwa investasi dalam pendidikan dan keterampilan dapat meningkatkan produktivitas individu, yang kemudian berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Becker, 1964). Kajian literatur terbaru mengenai kebijakan pendidikan dan modal manusia menegaskan bahwa pemaknaan modal manusia perlu diperluas melampaui orientasi produktivitas ekonomi semata, dengan turut memperhitungkan dimensi etis, kultural, dan keadilan sosial agar manfaat pendidikan terdistribusi secara merata (Ma, 2025).

2.3. Capability Approach

Amartya Sen menegaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh pendapatan, tetapi juga oleh kemampuan individu (capability) dalam mengakses peluang dan menjalani kehidupan yang dianggap bernilai dan bermakna (Waterloo) & Sen, 1999). Pendekatan

ini menjadi landasan konseptual penting karena menggeser fokus evaluasi kesejahteraan dari sekadar akumulasi sumber daya menuju kebebasan substantif individu untuk mencapai fungsi-fungsi (functionings) yang mereka pandang berharga.

2.4. Social Capital Theory

Modal sosial yang meliputi kepercayaan, jaringan sosial, dan partisipasi dalam komunitas memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan melalui perluasan akses informasi, dukungan sosial, dan peluang ekonomi (“Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community,” 2000). Tinjauan sistematis terhadap modal sosial dan kesejahteraan sosial menunjukkan bahwa kepercayaan dan partisipasi komunitas berkontribusi pada keamanan ekonomi, kohesi sosial, dan keberlanjutan lingkungan sebagai tiga pilar yang saling terkait dalam membentuk kesejahteraan komunitas secara multidimensional. Studi lain juga menunjukkan bahwa modal sosial pada level lingkungan dapat memoderasi dampak negatif ketimpangan pendapatan terhadap kesejahteraan subjektif, sebagaimana ditemukan dalam konteks masyarakat urban di Tiongkok (Huang & Fang, 2021).

2.5. Financial Inclusion and Welfare Theory

Inklusi keuangan, yaitu akses dan penggunaan layanan keuangan formal seperti tabungan, kredit, dan pembayaran digital, telah berkembang menjadi salah satu kerangka teoretis penting dalam memahami kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Tinjauan literatur mengenai dampak kesejahteraan dari inklusi keuangan mengidentifikasi tren penelitian utama, meliputi fintech dan inklusi keuangan digital, keberlanjutan, pertumbuhan, kemiskinan, ketimpangan pendapatan, stabilitas keuangan, dan kewirausahaan sebagai area yang saling berkaitan. Hasil meta-analisis lintas studi juga menunjukkan bahwa inisiatif inklusi keuangan memberikan efek positif yang signifikan secara statistik, meskipun berukuran kecil, terhadap konsumsi rumah tangga, pendapatan, dan indikator terkait kemiskinan lainnya (Biru et al., 2024).

2.6. Sustainable Development Theory

Konsep pembangunan berkelanjutan menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat harus dicapai melalui keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga keberlanjutan jangka panjang dapat terjamin (United Nations, 2015). Kerangka ini menjadi penting karena menempatkan kesejahteraan bukan sebagai tujuan jangka pendek, melainkan sebagai proses berkelanjutan yang harus memperhatikan keterbatasan sumber daya antar-generasi.

2.7. Kerangka Integratif Penelitian

Berdasarkan tinjauan keenam perspektif teoretis di atas, penelitian ini mengajukan kerangka integratif yang memosisikan pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi modal manusia (*human capital foundation*), kesempatan kerja dan pendapatan sebagai jalur transmisi ekonomi langsung (*direct economic transmission*), serta inklusi keuangan dan modal sosial sebagai enabler struktural (*structural enabler*) yang memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga. Ketiga klaster determinan ini saling berinteraksi secara dinamis, sebagaimana akan dielaborasi lebih lanjut dalam bagian hasil dan pembahasan.

2.8. Kebijakan Proteksi Sosial sebagai Instrumen Intervensi Komparatif

Di luar determinan struktural yang telah diuraikan, literatur kebijakan publik juga banyak mengkaji instrumen intervensi langsung pemerintah dalam mendorong kesejahteraan, terutama melalui program proteksi sosial berupa transfer tunai (*cash transfer*). Secara global, lebih dari 140 negara tercatat memiliki program transfer tunai, dengan sekitar 70 persen berbentuk transfer tunai tanpa persyaratan (*unconditional cash transfer/UCT*) dan 43 persen berbentuk transfer tunai bersyarat (*conditional cash transfer/CCT*) (Semba et al., 2022), yang menunjukkan bahwa kedua model tersebut acap kali berjalan secara simultan dalam satu sistem proteksi sosial nasional. Tinjauan sistematis berbasis PRISMA terhadap program transfer tunai di Afrika Sub-Sahara menemukan bahwa CCT secara umum lebih efektif mencapai target spesifik di bidang pendidikan dan kesehatan karena memberikan insentif perilaku langsung, sementara UCT menawarkan fleksibilitas yang lebih besar bagi penerima manfaat serta terbukti lebih unggul dalam memperbaiki kesehatan mental dan ketahanan ekonomi pada konteks yang rentan (*fragile settings*) (Rasyidi et al., 2026).

Studi komparatif lintas kawasan turut menggarisbawahi bahwa efektivitas program transfer tunai bersifat sangat kontekstual. Kajian terhadap kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) menunjukkan bahwa penelitian selama lebih dari lima belas tahun secara konsisten mendemonstrasikan bahwa transfer tunai dapat menurunkan kemiskinan dan meningkatkan konsumsi rumah tangga di negara berpendapatan rendah dan menengah, namun pertanyaan kritis tetap muncul mengenai apakah terdapat efek ambang batas (threshold effect), di mana nominal transfer yang kecil hanya memodifikasi perilaku jangka pendek, sementara pengurangan kemiskinan yang substansial memerlukan nominal transfer yang jauh lebih besar (Brik, 2025). Pengalaman Indonesia sendiri, melalui program Bantuan Langsung Tunai, kerap disandingkan dengan program serupa di Ghana (Livelihood Empowerment Against Poverty), Tanzania (Productive Social Safety Net), dan Uganda (Social Assistance Grants for Empowerment) sebagai bagian dari gelombang ekspansi proteksi sosial berbasis transfer tunai di negara berkembang (Rasyidi et al., 2026). Pola ini menegaskan bahwa intervensi kebijakan kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari konteks kapasitas kelembagaan negara dalam mengidentifikasi, mendaftarkan, dan menyalurkan manfaat kepada kelompok sasaran secara tepat, sebuah dimensi institusional yang akan dikembangkan lebih lanjut dalam pembahasan implikasi kebijakan pada bagian akhir artikel ini.

3. METHOD

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan mengikuti pedoman PRISMA 2020 (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) untuk memastikan proses pengumpulan, seleksi, dan analisis literatur dilakukan secara sistematis, transparan, dan dapat direplikasi (Page et al., 2021). Pedoman PRISMA 2020 dipilih karena menyediakan struktur pelaporan 27 item yang telah diperbarui untuk mencerminkan perkembangan metodologi tinjauan sistematis selama satu dekade terakhir, termasuk panduan eksplisit mengenai identifikasi, penyaringan, dan sintesis bukti.

3.2. Sumber Data dan Strategi Pencarian

Sumber data yang digunakan mencakup basis data Scopus, Web of Science, ScienceDirect, serta Google Scholar dengan rentang publikasi tahun 2015 hingga 2025. Kata kunci pencarian meliputi “social welfare”, “socioeconomic determinants”, “income inequality”, “human capital”, “social capital”, dan “financial inclusion”, yang dikombinasikan menggunakan operator Boolean (AND/OR) untuk memaksimalkan cakupan pencarian sekaligus menjaga relevansi tematik.

3.3. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria inklusi mencakup artikel jurnal yang telah melalui proses peer-review, ditulis dalam bahasa Inggris atau Indonesia, serta secara spesifik membahas determinan kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial-ekonomi. Sementara itu, publikasi non-ilmiah seperti editorial, opini, dan prosiding konferensi yang tidak melalui proses review sejawat dikeluarkan dari analisis (Tranfield et al., 2003). Artikel yang hanya membahas determinan kesehatan klinis tanpa keterkaitan eksplisit terhadap dimensi sosial-ekonomi kesejahteraan juga dieksklusi untuk menjaga fokus tematik tinjauan.

3.4. Prosedur Seleksi dan Sintesis

Proses seleksi literatur dilakukan melalui empat tahap berurutan sesuai diagram alir PRISMA 2020, yaitu identifikasi (identification), penyaringan (screening), penilaian kelayakan (eligibility), dan inklusi (inclusion). Pada tahap identifikasi, seluruh artikel yang muncul dari kombinasi kata kunci dikumpulkan dan duplikasi dihapus. Tahap penyaringan dilakukan melalui pembacaan judul dan abstrak untuk menyingkirkan artikel yang tidak relevan secara tematik. Tahap penilaian kelayakan melibatkan pembacaan teks lengkap (full-text) untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria inklusi. Artikel yang lolos seluruh tahap kemudian dianalisis secara tematik (thematic synthesis) untuk mengidentifikasi pola, persamaan, dan perbedaan temuan antarstudi, sehingga dapat disintesis menjadi kerangka determinan kesejahteraan yang terintegrasi sebagaimana diuraikan pada bagian hasil.

3.5. Analisis Data dan Pengkodean Tematik

Analisis data dilakukan melalui pendekatan sintesis naratif-tematik (narrative-thematic synthesis), yang dipilih karena heterogenitas desain studi pada literatur yang dianalisis, mulai dari studi cross-sectional,

tinjauan sistematis sektoral, hingga metaanalisis, sehingga tidak memungkinkan dilakukannya metaanalisis kuantitatif tunggal. Setiap artikel yang lolos kriteria inklusi dibaca secara menyeluruh, kemudian temuan utamanya diekstraksi ke dalam matriks ekstraksi data yang mencakup nama penulis, tahun publikasi, konteks geografis, metode penelitian, variabel determinan yang dikaji, serta temuan utama. Selanjutnya, temuan-temuan tersebut dikelompokkan secara induktif ke dalam kategori tematik berdasarkan kesamaan determinan yang dibahas, menghasilkan enam tema utama, yaitu pendidikan, pendapatan, kesempatan kerja, kesehatan, inklusi keuangan, dan modal sosial, sebagaimana disajikan pada bagian hasil. Proses pengelompokan tematik ini bersifat iteratif, dengan kategori awal terus disempurnakan seiring bertambahnya artikel yang dianalisis, hingga tercapai saturasi tematik (*thematic saturation*), yaitu kondisi ketika penambahan artikel baru tidak lagi menghasilkan kategori tematik yang secara signifikan berbeda dari kategori yang telah teridentifikasi.

3.6. Penjaminan Kualitas dan Keterbatasan Metodologis

Untuk menjaga kualitas sintesis, penulis memprioritaskan artikel yang diterbitkan pada jurnal terindeks Scopus, Web of Science, atau jurnal nasional terakreditasi yang menerapkan proses *peer-review*, serta memberikan perhatian khusus pada tinjauan sistematis dan metaanalisis yang secara eksplisit mengikuti pedoman metodologis seperti PRISMA, mengingat desain tersebut secara inheren memiliki tingkat agregasi bukti yang lebih tinggi dibandingkan studi *primer* tunggal. Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa pendekatan SLR naratif-tematik memiliki keterbatasan dibandingkan metaanalisis kuantitatif formal, khususnya dalam hal kemampuan mengestimasi ukuran efek (*effect size*) gabungan secara statistik. Keterbatasan metodologis ini akan didiskusikan lebih lanjut pada bagian keterbatasan studi.

4. RESULTS AND EMPIRICAL FINDINGS

Berdasarkan proses seleksi yang dijelaskan pada bagian metodologi, artikel-artikel yang lolos kriteria inklusi dikelompokkan ke dalam tujuh tema determinan utama kesejahteraan masyarakat, yaitu pendidikan, pendapatan, kesempatan kerja, kesehatan, inklusi keuangan, modal sosial, dan proteksi sosial. Pengelompokan ini didasarkan pada frekuensi kemunculan tema dalam literatur yang dianalisis serta kekuatan hubungan empiris yang dilaporkan pada

masing-masing studi. Tema proteksi sosial ditambahkan sebagai kategori tersendiri karena literatur kebijakan publik memperlakukannya sebagai instrumen intervensi aktif pemerintah, berbeda dari enam determinan lain yang umumnya bersifat struktural dan berkembang secara organik dalam masyarakat.

4.1. Pendidikan sebagai Determinan Utama

Literatur menunjukkan bahwa pendidikan memiliki hubungan positif yang konsisten terhadap kesejahteraan, terutama melalui peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi umumnya memiliki kualitas hidup yang lebih baik (Becker, 1964; OECD, 2015). Kajian sistematis mengenai dampak pendidikan terhadap pengentasan kemiskinan menegaskan bahwa pendidikan merupakan jalur efektif keluar dari kemiskinan, dengan mekanisme yang dapat dijelaskan melalui integrasi teori modal manusia dan modal sosial pada dua dimensi ruang sosial kemiskinan, yakni sphere institusional dan sphere jaringan sosial.

Studi lain pada level kebijakan pendidikan tinggi juga menemukan bahwa investasi pendidikan berkontribusi pada penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi, yang pada gilirannya mendorong kerja sama internasional serta pertumbuhan ekonomi, sebagaimana ditunjukkan oleh korelasi kuat antara modal pengetahuan populasi dan pertumbuhan ekonomi baik di negara maju maupun berkembang. Tinjauan literatur sistematis terbaru mengenai kebijakan pendidikan dan modal manusia periode 2014-2024 menambahkan nuansa kritis penting: pemaknaan pendidikan yang terlalu sempit sebagai investasi produktivitas semata berisiko mengabaikan dimensi etis, kultural, dan keadilan sosial dari pendidikan, sehingga manfaatnya dapat terdistribusi secara tidak merata antarkelompok masyarakat meskipun secara agregat angka partisipasi pendidikan terus meningkat (Ma, 2025). Implikasinya, kebijakan pendidikan yang hanya berorientasi pada peningkatan angka rata-rata lama sekolah tanpa memperhatikan kesenjangan kualitas antarwilayah berpotensi memperlebar, bukan mempersempit, ketimpangan kesejahteraan jangka panjang.

4.2. Pendapatan dan Kesejahteraan.

Pendapatan rumah tangga merupakan indikator langsung dari kesejahteraan karena menentukan kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk kesehatan dan pendidikan. Ketimpangan pendapatan juga menjadi faktor utama yang mendorong kesenjangan sosial-ekonomi (Bank, 2019). Namun demikian, literatur

terbaru menggeser pemahaman sederhana bahwa pendapatan absolut adalah satu-satunya determinan kepuasan hidup.

Studi multinasional terbaru yang menganalisis lebih dari 90.000 responden di 109 negara, menggunakan data enam gelombang survei Gallup World Poll periode 2013–2024, menemukan bahwa peringkat pendapatan (income rank) seseorang dalam distribusi pendapatan domestiknya memprediksi kepuasan hidup secara lebih kuat dibandingkan nominal pendapatan absolut. Lebih lanjut, konsekuensi psikologis dari posisi pendapatan tersebut tidak bersifat mutlak atau tidak terelakkan, melainkan sangat dipengaruhi oleh tingkat keterhubungan sosial di sekitar individu yang bersangkutan (Quispe-Torreblanca et al., 2026). Artinya, masyarakat yang berinvestasi pada keterhubungan sosial dan keterlibatan komunitas dapat meredam dampak negatif kecemasan status (status anxiety) yang ditimbulkan oleh ketimpangan pendapatan, sebuah temuan yang memberikan landasan empiris kuat bagi argumen bahwa kebijakan penguatan koneksi sosial dapat sama pentingnya dengan kebijakan peningkatan pendapatan nominal dalam mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Temuan ini menegaskan bahwa hubungan antara pendapatan dan kesejahteraan bersifat kontekstual dan dimoderasi oleh faktor sosial, bukan bersifat linear dan universal.

4.3. Kesempatan Kerja

Akses terhadap pekerjaan yang layak berkontribusi pada stabilitas ekonomi rumah tangga, sedangkan pengangguran berkorelasi dengan meningkatnya risiko kemiskinan dan instabilitas sosial (International Labour Organization, 2021). Kajian mengenai hubungan siklis antara pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pada konteks negara berkembang menemukan adanya pola saling-memperburuk (mutually reinforcing cycle), di mana peningkatan pengangguran memperparah kemiskinan, yang kemudian memperlebar ketimpangan, sehingga kebijakan ekonomi yang ditargetkan secara spesifik diperlukan untuk memutus siklus tersebut.

Pola siklis ini memiliki implikasi penting bagi desain kebijakan ketenagakerjaan: intervensi yang hanya menysasar penciptaan lapangan kerja tanpa memperhatikan kualitas pekerjaan (job quality) berisiko menghasilkan perangkap kemiskinan kerja (working poverty trap), di mana individu memiliki pekerjaan namun pendapatannya tetap tidak mencukupi untuk keluar dari kemiskinan. Dengan demikian, kesempatan kerja sebagai determinan kesejahteraan tidak dapat

dipahami semata dari sisi kuantitas penyerapan tenaga kerja, melainkan juga harus memperhitungkan dimensi kualitas, keberlanjutan, dan tingkat upah pekerjaan yang tersedia.

4.4. Kesehatan

Kondisi kesehatan yang baik berperan dalam meningkatkan produktivitas individu serta mengurangi beban ekonomi rumah tangga, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan (World Health Organization, 2021). Tinjauan literatur mengenai manfaat ekonomi dari investasi pada kesehatan perempuan menunjukkan bahwa kondisi kesehatan yang buruk memiliki konsekuensi tidak hanya pada generasi yang bersangkutan, tetapi juga berimplikasi pada partisipasi angkatan kerja, produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan ekonomi keluarga secara lintas-generasi.

Dimensi gender dalam determinan kesehatan ini layak mendapat perhatian khusus. Secara global, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja tercatat jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki, dan kondisi kesehatan yang buruk seperti diabetes, hipertensi, atau gangguan psikiatrik terbukti menurunkan probabilitas keterlibatan perempuan dalam pasar kerja secara signifikan. Pola ini menunjukkan bahwa determinan kesehatan berinteraksi dengan struktur sosial gender dalam membentuk kesejahteraan, sehingga kebijakan kesehatan masyarakat yang sensitif gender berpotensi memberikan dampak ganda, baik bagi kesehatan itu sendiri maupun bagi pemerataan kesempatan ekonomi antara laki-laki dan perempuan.

4.5. Inklusi Keuangan

Akses terhadap layanan keuangan formal, seperti tabungan dan kredit, memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan aktivitas ekonomi serta mengurangi kerentanan finansial (Demirgüç-Kunt et al., 2018). Tinjauan literatur sistematis mengenai fintech dan inklusi keuangan menemukan bahwa teknologi finansial dapat memfasilitasi akses terhadap sumber daya keuangan bagi rumah tangga miskin serta mendukung perluasan partisipasi ekonomi perempuan melalui akses layanan keuangan, meskipun kesenjangan inklusi keuangan berdasarkan gender dan kekayaan masih menjadi tantangan yang belum terpecahkan di banyak negara berkembang (Dao et al., 2025).

Hasil meta-analisis terhadap berbagai inisiatif inklusi keuangan secara konsisten menunjukkan efek positif terhadap konsumsi, pendapatan, dan aset rumah tangga, meskipun ukuran efeknya relatif kecil dan bervariasi antarwilayah (Biru et al., 2024). Temuan ini penting

secara metodologis karena mengoreksi ekspektasi berlebihan terhadap inklusi keuangan sebagai solusi tunggal pengentasan kemiskinan; alih-alih, inklusi keuangan tampak berfungsi optimal ketika dikombinasikan dengan determinan lain seperti literasi keuangan, pendidikan, dan jaringan dukungan sosial. Analisis tematik lebih lanjut juga mengidentifikasi tren penelitian inklusi keuangan yang berkembang ke arah keberlanjutan, perubahan iklim, stabilitas keuangan, dan kewirausahaan, menandakan bahwa kerangka konseptual inklusi keuangan semakin diperluas melampaui sekadar akses transaksi keuangan dasar.

4.6. Modal Sosial

Modal sosial berperan dalam memperluas akses terhadap informasi, jaringan, dan peluang ekonomi, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (“Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community,” 2000). Studi pada konteks perkotaan di Tiongkok menemukan bahwa modal sosial pada level komunitas memoderasi hubungan antara ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan subjektif, di mana individu dengan akses modal sosial yang lebih tinggi cenderung lebih tahan terhadap dampak negatif ketimpangan pendapatan terhadap kepuasan hidup mereka (Huang & Fang, 2021).

Temuan lintas-negara terbaru turut menunjukkan bahwa kepercayaan, keterlibatan komunitas, dan partisipasi sosial yang bermakna memainkan peran krusial dalam membentuk bagaimana individu memaknai kedudukan mereka dalam masyarakat dan menilai kualitas hidup mereka secara keseluruhan (Quispe-Torreblanca et al., 2026). Konsistensi temuan dari konteks geografis yang berbeda, yaitu Tiongkok dan studi lintas 109 negara, memperkuat keyakinan bahwa fungsi penyangga (*buffering function*) modal sosial terhadap dampak negatif ketimpangan bersifat relatif universal, tidak terbatas pada konteks budaya atau tingkat pembangunan ekonomi tertentu, meskipun kekuatan efeknya dapat bervariasi mengikuti karakteristik institusional masing-masing negara.

4.7. Proteksi Sosial sebagai Instrumen Intervensi

Berbeda dari enam determinan struktural sebelumnya, proteksi sosial berbasis transfer tunai merupakan instrumen kebijakan aktif yang dirancang pemerintah untuk secara langsung memengaruhi kesejahteraan kelompok rentan. Secara global, lebih dari 140 negara

tercatat memiliki program transfer tunai, dengan sekitar 70 persen berbentuk transfer tunai tanpa persyaratan dan 43 persen berbentuk transfer tunai bersyarat, yang menunjukkan tumpang tindih implementasi kedua model pada banyak negara.

Bukti efektivitas program ini bervariasi menurut konteks dan desain. Tinjauan sistematis menunjukkan bahwa transfer tunai di Afrika Sub-Sahara efektif meningkatkan berbagai determinan sosial kesehatan, dengan efektivitas transfer bersyarat dan tanpa persyaratan bervariasi tergantung pada konteks dan hasil yang diharapkan (Owusu-Addo et al., 2018). Kajian pada kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara menunjukkan bahwa efektivitas transfer tunai dalam menurunkan kemiskinan dan meningkatkan konsumsi sangat bergantung pada besaran transfer, di mana pengurangan kemiskinan yang berarti membutuhkan ambang batas transfer tertentu (Brik, 2025).

4.8. Ringkasan Temuan Lintas Tema

Tabel 1 menyajikan ringkasan ketujuh tema determinan kesejahteraan masyarakat beserta mekanisme utama dan sumber pendukungnya, sebagai sintesis dari temuan-temuan pada subbagian 4.1 hingga 4.7.

Determinan	Mekanisme Utama	Sumber Pendukung
Pendidikan	Meningkatkan produktivitas dan akses kerja melalui akumulasi modal manusia; berisiko timpang bila kualitas tidak merata	Becker (1964); OECD (2015); Ma (2025)
Pendapatan	Menentukan kapasitas pemenuhan kebutuhan dasar; dimoderasi oleh peringkat relatif dan konteks sosial (Quispe-Torreblanca et al., 2026)	World Bank (2020); Quispe-Torreblanca et al. (2026)
Kesempatan Kerja	Menjadi mekanisme transmisi antara pendidikan dan pendapatan; kualitas pekerjaan menentukan keluarnya dari working poverty (Alwrekiat et al., 2023)	ILO (2021)
Kesehatan	Meningkatkan produktivitas dan partisipasi angkatan kerja lintas generasi; berinteraksi dengan struktur gender	WHO (2021)
Inklusi Keuangan	Mengurangi kerentanan finansial dan memperluas partisipasi ekonomi formal;	Demirgüç-Kunt et al. (2018); Biru et al.

	efek optimal bila dipadukan determinan lain	(2024); Kayadibi et al. (2024)
Modal Sosial	Memperluas akses informasi dan jaringan; memoderasi dampak ketimpangan pendapatan secara relatif universal	Putnam (2000); Huang & Fang (2021); Quispe-Torreblanca et al. (2026)
Proteksi Sosial	Intervensi aktif pemerintah melalui transfer tunai bersyarat/tanpa syarat; efektivitas bergantung pada desain dan konteks	Tinjauan sistematis transfer tunai Afrika Sub-Sahara & MENA (2023–2024)

Tabel 1. Ringkasan Determinan Kesejahteraan Masyarakat dan Mekanismenya

5. DISCUSSION: IMPLICATIONS AND RECOMMENDATIONS

Hasil sintesis Systematic Literature Review (SLR) menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan konsep yang bersifat multidimensional dan tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu variabel tunggal. Temuan utama mengindikasikan bahwa faktor ekonomi dan sosial saling berinteraksi dalam membentuk tingkat kesejahteraan individu maupun rumah tangga. Dalam perspektif pembangunan, kesejahteraan tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga dimensi non-material seperti pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup (Human Development Report 2021/2022: Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping Our Future in a Transforming World [EN/RU/ZH], 2022; Stiglitz et al., 2009)

Pendidikan muncul sebagai determinan yang paling konsisten dalam berbagai literatur yang dianalisis. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam modal manusia menjadi fondasi utama peningkatan kesejahteraan jangka panjang. Pendidikan tidak hanya meningkatkan keterampilan dan produktivitas, tetapi juga memperluas akses terhadap peluang kerja dan mobilitas sosial (Becker, 1964; OECD, 2015) Namun, kajian kontemporer mengingatkan bahwa pemaknaan modal manusia yang terlalu sempit pada aspek produktivitas berisiko mengabaikan dimensi etis dan keadilan distributif pendidikan itu sendiri

(Ma, 2025), sehingga kebijakan pendidikan idealnya tidak hanya diarahkan pada peningkatan output ekonomi, tetapi juga pemerataan akses antarkelompok sosial.

Kesempatan kerja berfungsi sebagai mekanisme perantara yang menghubungkan pendidikan dengan pendapatan. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki akses yang lebih besar terhadap pekerjaan yang layak dan stabil. Kondisi ini kemudian berkontribusi pada peningkatan pendapatan rumah tangga dan stabilitas ekonomi (International Labour Organization, 2021). Dalam konteks ini, pasar tenaga kerja menjadi saluran penting dalam transformasi modal manusia menjadi kesejahteraan ekonomi, sekaligus menjadi titik rentan ketika terjadi pelemahan ekonomi makro, sebagaimana tercermin dalam pola siklus saling-memperburuk antara pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pada negara-negara berkembang.

Pendapatan ditemukan sebagai determinan paling langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Tingkat pendapatan menentukan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Namun demikian, beberapa studi menegaskan bahwa peningkatan pendapatan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan apabila tidak disertai akses terhadap layanan publik yang memadai (Bank, 2019). Temuan ini diperkuat oleh hasil studi lintas-negara terbaru yang menunjukkan bahwa hubungan antara peringkat pendapatan dan kepuasan hidup bersifat kontekstual: konsekuensi psikologis dari posisi pendapatan seseorang dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat konektivitas sosial di sekitarnya, sehingga kebijakan yang semata berorientasi pada peningkatan pendapatan tanpa memperkuat modal sosial berisiko kurang optimal dalam mendorong kesejahteraan subjektif (Quispe-Torreblanca et al., 2026). Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan juga dipengaruhi oleh faktor struktural dan relasional, bukan semata oleh besaran nominal pendapatan.

Kesehatan berperan sebagai faktor fundamental dalam meningkatkan produktivitas individu. Kondisi kesehatan yang baik memungkinkan individu untuk berpartisipasi secara optimal dalam aktivitas ekonomi, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan dan kualitas hidup. Sebaliknya, kondisi kesehatan yang buruk dapat menjadi penghambat utama dalam mobilitas sosial dan ekonomi, bahkan berdampak lintas-generasi sebagaimana ditunjukkan dalam kajian mengenai investasi kesehatan perempuan dan implikasinya

terhadap partisipasi angkatan kerja dan pendapatan keluarga (World Health Organization, 2021). Oleh karena itu, kesehatan dapat dipandang sebagai modal dasar dalam pembangunan kesejahteraan yang efeknya tidak terbatas pada individu yang bersangkutan, melainkan menjalar pada unit rumah tangga secara keseluruhan.

Modal sosial juga memiliki kontribusi signifikan dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat. Jaringan sosial, tingkat kepercayaan, dan partisipasi komunitas memungkinkan individu memperoleh akses informasi, dukungan sosial, serta peluang ekonomi yang lebih luas. Dalam banyak kasus, modal sosial berfungsi sebagai mekanisme informal yang membantu masyarakat mengatasi keterbatasan sumber daya ekonomi ("Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community," 2000). Temuan dari konteks urban Tiongkok memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa modal sosial pada level komunitas memoderasi dampak negatif ketimpangan pendapatan terhadap kesejahteraan subjektif (Huang & Fang, 2021); sementara studi multinasional terbaru menegaskan bahwa kebijakan yang memperkuat keterhubungan sosial dapat sama pentingnya dengan kebijakan peningkatan pendapatan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat (Quispe-Torreblanca et al., 2026). Hal ini menegaskan pentingnya dimensi sosial-relasional dalam pembangunan kesejahteraan, yang selama ini cenderung kurang mendapat perhatian dibandingkan dimensi ekonomi-material.

Selain itu, inklusi keuangan menjadi faktor yang semakin relevan dalam literatur kontemporer. Akses terhadap layanan keuangan formal seperti tabungan, kredit, dan layanan digital memungkinkan masyarakat mengelola risiko ekonomi dan meningkatkan aktivitas produktif. Inklusi keuangan juga memperluas partisipasi masyarakat dalam sistem ekonomi formal, sehingga berkontribusi pada penguatan ketahanan ekonomi rumah tangga (Demirgüç-Kunt et al., 2018). Tinjauan literatur terkini mengenai fintech dan inklusi keuangan menambahkan nuansa penting, yakni bahwa manfaat teknologi finansial belum terdistribusi secara setara, dengan kesenjangan gender dan kekayaan yang masih menjadi tantangan struktural di banyak negara berkembang (Dao et al., 2025). Hasil meta-analisis juga menunjukkan bahwa meskipun efek inklusi keuangan terhadap kesejahteraan bersifat positif dan signifikan secara statistik, magnitudonya relatif kecil (Biru et al., 2024), sehingga inklusi keuangan sebaiknya dipandang sebagai enabler yang bekerja

secara komplementer dengan determinan lain, bukan sebagai solusi tunggal pengentasan kemiskinan.

Secara keseluruhan, hasil SLR ini menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor pendidikan, kesempatan kerja, pendapatan, kesehatan, modal sosial, inklusi keuangan, dan proteksi sosial. Mengacu pada kerangka integratif yang diajukan pada bagian tinjauan pustaka, pendidikan dan kesehatan dapat dipandang sebagai fondasi modal manusia yang membentuk kapasitas dasar individu; kesempatan kerja dan pendapatan berfungsi sebagai jalur transmisi ekonomi langsung yang mengonversi kapasitas tersebut menjadi kesejahteraan material; sementara inklusi keuangan dan modal sosial bertindak sebagai faktor pendorong struktural yang memperkuat atau, sebaliknya, dapat melemahkan efektivitas kedua jalur tersebut. Proteksi sosial, sebagai instrumen kebijakan aktif, dapat dipahami sebagai mekanisme koreksi (*corrective mechanism*) yang bekerja ketika ketiga klaster determinan struktural di atas belum cukup untuk mengangkat kelompok rentan keluar dari kemiskinan, sebagaimana tercermin dari masifnya adopsi program transfer tunai di lebih dari 140 negara (Almenfi et al., 2020). Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kesejahteraan tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan ekonomi semata, melainkan membutuhkan pendekatan multidimensi yang terintegrasi (Sen, 1999; Stiglitz et al., 2009). Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perlu dirancang secara holistik dengan memperhatikan keterkaitan antarvariabel tersebut dalam satu sistem yang saling memengaruhi, alih-alih merancang intervensi tunggal pada salah satu determinan secara terisolasi.

Sintesis ini juga relevan untuk dibaca berdampingan dengan kerangka pengukuran kesejahteraan kontemporer seperti Multidimensional Poverty Index (MPI). Fakta bahwa MPI menempatkan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup sebagai tiga dimensi inti yang berbobot setara sejalan dengan temuan SLR ini, yang juga mengidentifikasi pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi modal manusia yang konsisten muncul dalam literatur. Namun demikian, MPI sebagai instrumen pengukuran belum secara eksplisit mengakomodasi dimensi modal sosial dan keterhubungan relasional, padahal temuan terbaru menunjukkan bahwa dimensi ini berperan signifikan dalam memoderasi dampak determinan lain terhadap kesejahteraan subjektif (Xu et al., 2023). Hal ini mengindikasikan adanya potensi pengembangan lebih lanjut terhadap kerangka pengukuran kesejahteraan multidimensional di masa depan dengan

mengintegrasikan indikator modal sosial sebagai dimensi keempat yang setara pentingnya dengan tiga dimensi MPI yang telah ada.

4.9. Implikasi Kebijakan

Temuan SLR ini memiliki sejumlah implikasi kebijakan yang konkret. Pertama, pada level perancangan program, kerangka integratif tiga klaster determinan (fondasi modal manusia, jalur transmisi ekonomi, dan enabler struktural) menyarankan agar program peningkatan kesejahteraan dirancang sebagai paket intervensi terpadu, bukan program tunggal yang berdiri sendiri. Sebagai ilustrasi, program transfer tunai bersyarat yang dikombinasikan dengan persyaratan kehadiran sekolah dan kunjungan layanan kesehatan, sebagaimana banyak diterapkan pada program-program di Afrika Sub-Sahara, secara konseptual menggabungkan instrumen proteksi sosial dengan penguatan fondasi modal manusia dalam satu desain kebijakan (Fiszbein & Schady, 2009; Little et al., 2021) sehingga berpotensi menghasilkan efek pengganda (*multiplier effect*) yang lebih besar dibandingkan transfer tunai semata.

Kedua, pada level penargetan kebijakan (*policy targeting*), pemerintah disarankan untuk tidak semata mengandalkan indikator pendapatan dalam mengidentifikasi kelompok sasaran kebijakan kesejahteraan. Pendekatan *Multidimensional Poverty Index* yang memperhitungkan deprivasi pada dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup secara simultan dapat digunakan sebagai instrumen penargetan yang lebih presisi (Alkire & Santos, 2013; J. & Asadullah, 2022) mengingat penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan non-moneter dapat tetap persisten meskipun indikator pendapatan agregat suatu wilayah mengalami perbaikan. Hal ini sejalan dengan rekomendasi bahwa dukungan pendapatan idealnya dipasangkan dengan investasi terarah pada kesinambungan pendidikan, layanan kesehatan primer, dan layanan dasar lainnya, khususnya di wilayah-wilayah yang rentan.

Ketiga, pada level penguatan kapasitas kelembagaan, efektivitas program proteksi sosial maupun inklusi keuangan sangat bergantung pada kapasitas negara dalam mengidentifikasi, mendaftarkan, dan menyalurkan manfaat secara tepat sasaran. Pengalaman komparatif dari berbagai program transfer tunai di negara berkembang, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan di atas kertas, tetapi juga oleh kapasitas administratif dan tata kelola data kependudukan yang

mendasarinya (Rasyidi et al., 2026; Tuwu et al., 2026) Oleh karena itu, investasi pada sistem informasi kesejahteraan terpadu dan basis data kependudukan yang akurat merupakan prasyarat infrastruktur yang tidak kalah penting dibandingkan besaran anggaran program itu sendiri.

Keempat, pada level penguatan modal sosial, temuan mengenai fungsi penyangga modal sosial terhadap dampak negatif ketimpangan pendapatan menyarankan agar kebijakan pembangunan tidak hanya berfokus pada indikator ekonomi makro, tetapi juga menyertakan program penguatan kohesi sosial dan partisipasi komunitas sebagai bagian integral dari strategi kesejahteraan, mengingat investasi pada keterhubungan sosial dapat memberikan hasil yang sepadan dengan investasi pada peningkatan pendapatan semata dalam mendukung kepuasan hidup masyarakat secara berkelanjutan.

5.0. Keterbatasan Studi

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan temuannya. Pertama, sebagai sebuah tinjauan literatur naratif-tematik, studi ini tidak melakukan meta-analisis kuantitatif, sehingga tidak dapat memberikan estimasi ukuran efek (effect size) gabungan antardeterminan. Kedua, sebagian besar literatur yang dianalisis berasal dari konteks negara dengan karakteristik institusional yang beragam, sehingga generalisasi temuan ke konteks tertentu, khususnya negara berkembang dengan struktur kelembagaan yang berbeda, perlu dilakukan secara hati-hati. Ketiga, pencarian literatur dibatasi pada basis data tertentu dan rentang waktu 2015–2025, sehingga terdapat kemungkinan studi relevan yang diterbitkan di luar basis data atau rentang waktu tersebut tidak tercakup dalam sintesis ini.

6. CONCLUSION AND FUTURE RESEARCH DIRECTIONS

Secara umum, literatur menunjukkan adanya konsensus bahwa determinan utama kesejahteraan masyarakat mencakup pendidikan, pendapatan, kesempatan kerja, kesehatan, inklusi keuangan, modal sosial, dan proteksi sosial. Ketujuh determinan tersebut dapat dipetakan ke dalam tiga klaster fungsional, yaitu fondasi modal manusia (pendidikan dan kesehatan), jalur transmisi ekonomi langsung (kesempatan kerja dan pendapatan), enabler struktural (inklusi keuangan dan modal sosial), serta mekanisme koreksi kebijakan (proteksi sosial) yang bekerja melengkapi ketiga klaster lainnya. Namun demikian, hubungan antarvariabel tersebut masih menunjukkan variasi

tergantung pada konteks geografis, karakteristik sosial, serta pendekatan metodologis yang digunakan (Human Development Report 2021/2022: *Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping Our Future in a Transforming World* [EN/RU/ZH], 2022).

Implikasi kebijakan dari temuan ini menekankan bahwa strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dirancang secara sektoral dan terisolasi. Pemerintah dan pemangku kebijakan perlu merancang intervensi yang bersifat multisektor dan saling melengkapi, misalnya dengan memadukan perluasan akses pendidikan dengan penguatan inklusi keuangan, atau mengintegrasikan program kesehatan masyarakat dengan penguatan modal sosial pada level komunitas. Pendekatan semacam ini berpotensi menghasilkan efek sinergis yang lebih besar dibandingkan intervensi tunggal pada satu determinan saja.

Penelitian mendatang disarankan untuk mengembangkan studi empiris kuantitatif, termasuk meta-analisis, guna mengestimasi besaran kontribusi relatif masing-masing determinan terhadap kesejahteraan pada konteks geografis tertentu, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu, penelitian lanjutan juga disarankan untuk mengeksplorasi interaksi antara faktor digitalisasi keuangan dan modal sosial pada era ekonomi digital, mengingat kedua determinan ini menunjukkan dinamika perkembangan yang pesat namun belum banyak dikaji secara terintegrasi dalam literatur kesejahteraan.

Pada akhirnya, kontribusi utama studi ini terletak pada upaya mensintesiskan tujuh tema determinan yang selama ini cenderung dikaji secara terpisah ke dalam satu kerangka integratif tiga kluster fungsional. Kerangka ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal bagi peneliti dan pembuat kebijakan dalam merancang riset lanjutan maupun intervensi kebijakan yang lebih terkoordinasi antarsektor, sehingga upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak lagi berjalan secara terfragmentasi, melainkan sebagai satu sistem kebijakan yang saling memperkuat.

7. REFERENCES

Becker, G. S. (1964). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education*. University of Chicago Press.

- Biru, W. A., Otieno, D. J., & Mahuna, B. (2024). The impact of financial inclusion initiatives: Evidence from meta-analysis. *Journal of International Development*, 36(8), 2926–2958. <https://doi.org/10.1002/jid.3943>
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2018). The Global Findex Database 2017: Measuring financial inclusion and the fintech revolution. World Bank.
- Huang, J., & Fang, Y. (2021). Income inequality, neighbourhood social capital and subjective well-being in China: Exploration of a moderating effect. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(13), 6799. <https://doi.org/10.3390/ijerph18136799>
- International Labour Organization. (2021). World employment and social outlook: Trends 2021. ILO.
- Kayadibi, S., Gözaçan, N. B., & Çakmak, O. (2024). Financial inclusion and fintech: A state-of-the-art systematic literature review. *Financial Innovation*, 10, Article 169. <https://doi.org/10.1186/s40854-024-00741-0>
- Ma, Z. (2025). A systematic literature review of human capital and education policy 2014–2024. *Higher Education Research*, 10(6), 231–246. <https://doi.org/10.11648/j.her.20251006.12>
- Oxford Poverty and Human Development Initiative & United Nations Development Programme. (2024). 2024 global Multidimensional Poverty Index (MPI): Poverty amid conflict. UNDP. <https://hdr.undp.org/content/2024-global-multidimensional-poverty-index-mpi>
- OECD. (2015). In it together: Why less inequality benefits all. OECD.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., McGuinness, L. A., Stewart, L. A., Thomas, J., Tricco, A. C., Welch, V. A., Whiting, P., & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, Article n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>

- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Quispe-Torreblanca, E., De Neve, J.-E., & contributors. (2026). Social status and the relationship between income rank and well-being in 109 nations. *Nature Communications*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1038/s41467-026-69729-x>
- Saidi, A., Mensah, K., & Owusu, F. (2024). Effects of conditional and unconditional cash transfers on poverty reduction, education, and health outcomes in Sub-Saharan Africa: A PRISMA approach. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1080/10875549.2024.2426807>
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J. P. (2009). Report by the commission on the measurement of economic performance and social progress. OECD.
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. United Nations.
- United Nations Development Programme. (2022). *Human development report 2021/2022: Uncertain times, unsettled lives*. UNDP.
- United Nations Development Programme. (2025). *Human development report 2025: A matter of choice: People and possibilities in the age of AI*. UNDP.
- World Bank. (2020). *World development report 2020: Trading for development in the age of global value chains*. World Bank.
- World Health Organization. (2021). *World health statistics 2021: Monitoring health for the SDGs*. WHO.